

## FUNGSI KOMUNIKASI PEMIMPIN DALAM PENGUATAN NILAI KEBANGSAAN DI DAERAH PERBATASAN SKOUW PAPUA INDONESIA

Ririt Yuniar<sup>1\*</sup>; Imania Rahmah<sup>2</sup>; Imelda Kasiasih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia ;

rirityuniar@univpancasila.ac.id<sup>1</sup>, imaniarahmah@gmail.com<sup>2</sup>, imeldakasiasih19@gmail.com<sup>3</sup>

\*Correspondence : rirityuniar@univpancasila.ac.id

### ABSTRAK

Daerah perbatasan Skow Papua merupakan garda depan dari Indonesia yang perlu dikelola dan dimaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya dengan seoptimal mungkin. Pemimpin visioner sebagai faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan NKRI khususnya dalam optimalisasi sumber dayanya. Komunikasi menjadi aspek penting dalam melakukan upaya-upaya penyebaran informasi, penanaman nilai-nilai kebangsaan demi pembangunan pada daerah perbatasan. Tujuan penelitian ini untuk memetakan wujud fungsi komunikasi sosial dan dampak komunikasi sosial pemimpin di daerah perbatasan Skouw Papua Indonesia dengan konten pesan nilai-nilai kebangsaan. Mix methode, dengan melakukan wawancara mendalam kepada keterwakilan tokoh, data sekunder berupa dokumentasi, literatur, serta perspektif komunikasi menggunakan Fungsi Komunikasi Sosial. Hasil penelitian ini nilai-nilai kebangsaan (4 konsensus dasar bernegara) dalam praktiknya sudah direalisasikan, walaupun secara teknis masih belum optimal. Kesimpulannya, fungsi komunikasi sosial pemimpin untuk mengkonstruksi nilai-nilai kebangsaan yang kuat dimasyarakat perbatasan perlu dioptimalkan. Rekomendasi pertama, sistem kontrol yang harus dilakukan secara massif dari pemimpin pusat ke pemimpin tingkat daerah, dengan membangun fungsi komunikasi sosial pemimpin; kedua konstruksi nilai-nilai kebangsaan harus menjadi program yang berkelanjutan oleh seluruh pemimpin. Ketiga, sosialisasi nilai kebangsaan menjadi Gerakan Nasional yang massif.

### Kata kunci

*Fungsi Komunikasi, Nilai Kebangsaan, Papua, Pemimpinan, Perbatasan.*

### ABSTRACT

The Skow Papua border area is the vanguard of Indonesia that needs to be managed and maximize the potential of human resources and natural resources as optimally as possible. Visionary leaders as an influential factor in realizing the homeland, especially in the optimization of its resources. Communication is an important aspect in making efforts to disseminate information and planting national values for the sake of development in border areas. The purpose of this research is to map the form of social communication function and the impact of social communication of leaders in the border area of Skouw Papua Indonesia with the content of the message of national values. Mix method, by conducting in-depth interviews to the representation of figures, secondary data in the form of documentation, literature, and communication perspectives using social communication functions. The results of this study show that the values of nationality (4 basic consensus of the state) in practice have been realized, although technically still need to be more optimal.

In conclusion, the social communication function of leaders to construct strong national values in border communities needs to be optimized. The first recommendation is that the control

system should be carried out massively from Central leaders to regional leaders by building the leader's social communication function; secondly, the construction of national values should be a continuous program by all leaders. Third, the socialization of national values into a massive national movement

**Keywords**

*Border, Communication Function, Leadership, National Values, Papua,*

**Pendahuluan**

Wilayah Indonesia, secara teritorial terletak diantara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dikelilingi dua samudera yaitu samudera Hindia dan Pasifik (Wahyono, 2009). Indonesia mencapai jumlah pulau sebanyak 17.500 pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke serta berbatasan dengan negara-negara asing. Hal tersebut berpotensi untuk menambah *problem complexity* di daerah perbatasan, baik yang menyangkut persoalan di luar negeri, maupun di dalam negeri (Marsetio, 2009). Jayapura sebagai garda terdepan perlu mengelola dan memaksimalkan potensi fundamentalnya baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya secara optimal. Untuk mewujudkannya perlu dukungan peran pemimpin yang visioner dalam mengatasi dinamika atau *problem complexity*.

Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, sering kali mengalami permasalahan-permasalahan laten maupun tereksplorasi. Isu-isu sekuritisasi, *dispute border*, isu ketahanan nilai-nilai kebangsaan, kedaulatan nasional, serta isu koordinasi dan implementasi, menjadi hal serius yang harus segera diatasi bersama, baik masyarakat dan pemerintah sebagai kondisi di daerah perbatasan terkadang sangat tidak layak, yang mana daerah perbatasan kurang diperhatikan kemakmuran dan fasilitas masyarakatnya. Pada faktanya, kawasan perbatasan merupakan kawasan yang berperan penting karena merupakan wilayah strategis dalam memperkuat kedaulatan negara. Perbatasan yang strategis tentunya merupakan kekuatan negara, terutama jika berkaitan dengan kualitas kehidupan masyarakat yang meningkat dari segi ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, sosial, maupun lingkungan.

Fungsi utama komunikasi inilah yang menjadi pijakan teoretis untuk menyampaikan suatu pesan yang ingin disampaikan. Namun menurut William I. Gordon dalam (Deddy, 2005) menyatakan bahwa fungsi komunikasi terbagi menjadi empat. Dimana keempat fungsi komunikasi tersebut diantaranya: fungsi komunikasi sosial, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual dan fungsi komunikasi instrumental. Maka dari keempat fungsi komunikasi tersebut terdapat tujuan yang berbeda – beda. Keempat fungsi komunikasi di atas menunjukkan tujuan dan fokus yang berbeda pembahasan. Namun demikian dalam konteks ini peneliti mengambil fungsi komunikasi sosial sebagai literatur membahas dinamika perbatasan dalam penguatan nilai kebangsaan dari seorang pemimpin pada peran kepemimpinannya.

Komunikasi menjadi sarana mengetahui isu-isu masyarakat perbatasan merupakan isu dimana terjadi interaksi internasional ataupun akulturasi budaya berlangsung. Akulturasi budaya yang terjadi di masyarakat perbatasan, selaras dengan kondisi bangsa yang terbuka, adaptif, tanpa menghilangkan kearifan lokal dan budaya bangsa. Diharapkan masyarakat perbatasan dapat mewaspadaikan arus globalisasi dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia (Ernawam, 2017). Sebab,

kondisi pengaruh asing jika tidak terfilter dengan baik akan merusak kepribadian dan karakter bangsa.

Ke-Indonesia-an warga perbatasan Papua ditingkatkan nasionalismenya dengan cara mendorong sistem pengetahuan, melestarikan bahasa daerah, mendorong ekonomi berbasis keluarga, pemanfaatan sistem peralatan, peningkatan kegiatan kesenian dan pelestarian sistem religi atau kepercayaan setempat (Usman, 2021). Solusi lain yang ditawarkan oleh peneliti selanjutnya mengatasi persoalan Papua dapat diselesaikan dengan mengimplementasikan kebijakan bela negara dari bagian kebijakan kementerian pertahanan RI, dimana peran pemimpin dari kementerian tingkat pusat sampai daerah berpartisipasi dalam mewujudkannya (Tippe, 2013). Sedangkan persoalan belum berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diharapkan sebagai penggerak ekonomi di wilayah perbatasan dan sekitarnya juga menjadi fokus penelitian dengan pendekatan keamanan, kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan cara mengoptimalkan pengawasan di pos lintas batas keimigrasian. Dimana kurang optimalnya pos ini perlu penguatan kelembagaan, peningkatan personal dan kompetensi, serta pemenuhan sarana dan prasarana (Fatharossy, 2018). Namun demikian, pendapat lain dengan cara menghadirkan lembaga BUMKAn (semacam program UMKM) guna mengangkat program prioritas kampung yang melibatkan para pemimpin kampung dalam mewujudkan program tersebut (Ilham, Muttaqin, & Idris, 2020). Berbeda halnya dengan penelitian lainnya keberhasilan pembangunan di daerah perbatasan tidak sekedar itu, tetapi dari literasi media, infrastruktur, anggaran dan teknologi. Tentunya hal ini juga dimotori oleh peran leadership dan kapasitas sumber daya manusianya (Juditha, 2014).

Berbeda halnya dengan penelitian yang mengangkat potret kepemimpinan yang dianalisis dari isi pemberitaan untuk memframing kinerja pemimpin yang juga memiliki program kerja kebijakan BBM satu harga untuk pemerataan harga BBM sampai ke seluruh Papua yang di lansir oleh media; Peresmian Pos lintas batas Negara di Skouw yang dipesankan oleh pemimpin adalah daerah perbatasan merupakan daerah yang terdepan dan tidak boleh dilupakan dan display panel data PLBN ini menjadi pertahanan daerah perbatasan perlu dibanggakan (Pasha, 2018).

Komunikasi pemimpin yang juga mengangkat komitmen membangun Papua menjadi Tanah Damai, wujud pemerintah melindungi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang dilakukan dikomunikasikan dalam pidato pemimpin. Pesan komunikasi ini diangkat sebagai bentuk tinjauan analisis wacana kritis untuk menunjukkan komunikasi pemimpin (Syarif, 2019). Berbeda halnya dengan penelitian yang mengangkat pendidikan karakter di Papua. Perspektif komunikasi dengan menggunakan strategi komunikasi yang diangkat dalam penelitian tersebut menjadi perhatiannya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun karakter di Papua khususnya membangun fondasi karakter seluruh masyarakat dan para pemimpinnya. Pendidikan karakter ini menjadi modal dasar membangun bangsa dan negara. (Yuniar & Puspitasari, 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan nasionalisme, penguatan peningkatan keamanan melalui pos penjagaan, potret kinerja kepemimpinan yang ditinjau dari *framing* media yang melansirnya, sampai persoalan analisis kritis pidato pemimpin bangsa. Namun demikian, masih belum mengangkat perihal fungsi komunikasi pemimpin dengan pendekatan ilmu komunikasi guna mengonstruksi nilai-nilai kebangsaan. Penggabungan antar keduanya menjadi

salah satu *novelty* dari artikel ini. Sehingga tujuannya untuk mengisi celah dari penelitian sebelumnya dengan eksplorasi wujud fungsi komunikasi sosial pemimpin dan penjelasan dampaknya. Preposisi penelitian yang diasumsikan yaitu dapat membangun daerah perbatasan dengan baik salah satunya, jika pemimpin tersebut dapat mengkonstruksi nilai – nilai kebangsaan sebagai modal karakter yang fundamental dengan menerapkan fungsi komunikasi sosial pemimpin yang dapat bermanfaat bagi terwujudnya harmonisasi berbangsa dan bernegara.

## Metode

Penelitian ini dilakukan di wilayah Skow Papua merupakan daerah perbatasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional di Indonesia. *Mix-Method* dengan perspektif komunikasi dengan konten pesan nilai-nilai kebangsaan data yang primer wawancara mendalam dengan penentuan informan perwakilan tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, dan tokoh Perempuan serta penyebaran angket secara terbatas kepada Orang Asli Papua (OAP) usia dewasa, studi dokumen dan data sekunder, berupa penelitian terdahulu relevan. Pemetaan atau identifikasi masalah dengan desain penelitian, membuat pertanyaan, mendaftar data, Analisis data dengan menggunakan (tampilan, gabungan dan metainferences) dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama pengumpulan data baik data kuantitatif maupun kualitatif, reduksi data, penyajian/*display* data dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam kepada informan, penyebaran angket/survei, *literatur review* dihimpun. Tahap selanjutnya reduksi data yaitu hasil dari angket dan wawancara mendalam tersebut direduksi untuk proses pemilahan melalui cara *mapping*/menggolongkan dan menajamkan sehingga simpulan dan dapat mengarah dan dapat dianalisis dengan baik. Tahap selanjutnya yaitu display data. Data-data yang berhasil dikumpulkan dijabarkan dalam bentuk kategori-kategori agar mempermudah proses verifikasi. Pada tahap ini, data dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing. Setelah tahapan proses tersebut, peneliti melakukan pengambilan kesimpulan-kesimpulan dengan rajutan konseptual dan *theoretical frame work* yang digunakan sebagai detil validitas (Creswell & Creswell, 2018).

Secara teoretis tujuan dari fungsi komunikasi sosial, menyampaikan pesan secara pribadi. Dimana penyampaian pesan tersebut dapat melalui pembangunan konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, dengan meraih kebahagiaan dan menjauhi tekanan serta ketegangan, hal tersebut dilakukan guna mengembangkan hubungan dengan orang lain, untuk membentuk konsep diri. Konsep diri sebagai sudut pandang seseorang terhadap dirinya melalui orang lain terkait informasi tentang kepemimpinannya. Aspek yang menyangkut konsep diri termasuk jenis kelamin, agama, etnik, pendidikan, fisik dsb. Namun, pesan yang disampaikan pemimpin dalam konteks ini lebih mengarah pada pesan yang konteksnya kinerja, program pembangunan dan sosial masyarakat untuk membangun sebuah sistem komunikasi yang efektif. Informasi tersebut diperoleh karena adanya komunikasi yang berlangsung, sehingga adanya penukaran pesan dari orang lain (Takari, Hum, & Ph, 2019). Teori ini digunakan juga dalam memvalidasi penarikan kesimpulan pada temuannya dan sintesis analitisnya.

## Hasil dan Pembahasan

Komunikasi menjadi salah satu elemen kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Fungsi komunikasi pemimpin mengacu pada peran dan proses komunikasi dalam suatu

organisasi yang dipimpin oleh individu dalam posisi kepemimpinan. Komunikasi pemimpin yang efektif sangat penting untuk menyampaikan visi-misi, nilai, tujuan, dan strategi organisasi kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat luas. Hal ini melibatkan transmisi informasi dan penciptaan pemahaman bersama, yang penting untuk menyelaraskan upaya dan mencapai tujuan bersama. Setiap pemimpin perlu menjadi komunikator yang terampil dan efektif, karena mereka akan berinteraksi dengan masyarakat maupun antar pimpinan baik pusat maupun daerah. Dalam penelitian ini dibahas berkaitan dengan temuan hasil penelitian yaitu wujud komunikasi pemimpin dan dampak komunikasi sosial pemimpin dimasyarakat.

### **Wujud Fungsi Komunikasi Sosial Pemimpin Di Daerah Perbatasan Dalam Mengimplementasikan Nilai – Nilai Kebangsaan.**

Meskipun masih terdapat isu dan kerikil yang menimbulkan dinamika terjadi bagi bangsa Indonesia. Namun, negara berupaya dalam membendung arus globalisasi di masyarakat perbatasan, adapun masyarakat perbatasan yang cenderung mengalami permasalahan, seperti penyelundupan barang, *trespassing*, isu lingkungan, isu independensi atau merdekanya suatu wilayah, sampai tindakan kriminal internasional. Salah satu kasus yang telah terjadi adalah penyelundupan penduduk secara illegal oleh masyarakat Indonesia di Papua ke negara Papua New Guinea, hal ini menjadi kasus yang harus menurunkan pertahanan keamanan negara dari kedua belah negara, bahkan juga kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang kembali menelan kedua belah pihak (CNN Indonesia/BMW, 2022). Dengan kondisi tersebut berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam penanganannya baik dengan pendekatan sosial budaya, pendekatan agama, pendekatan pertahanan keamanan, dan kemanusiaan.

Dari data dan fakta di atas hal-hal yang jarang terekspose yaitu konstruksi nilai-nilai kebangsaan dan komunikasi sosial pemimpin di daerah perbatasan yang perlu diperkuat. Sehingga, perlu tinjauan literatur tentang konsep nilai-nilai kebangsaan dan fungsi komunikasi pemimpin yang menjadi landasan berpikir dalam analisis dan diskusi pembahasannya masyarakat perbatasan menjadi penting dan bermanfaat dalam artikel ini. Nilai-nilai kebangsaan yang berlaku, berlandaskan pada empat konsensus dasar yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945)). Pada suatu nilai-nilai kebangsaan, tentunya diperlukan variabel pendukung untuk penyelarasan dan penguatannya dengan pemahaman Wawasan Nusantara, Kepemimpinan, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan Sistem Manajemen Nasional yang selaras.

Presiden Soekarno pada tahun 1958 menegaskan bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, dimana Pancasila adalah satu "*Weltanschauung*", yang mana Pancasila sebagai "*philosophische grondslag*" atau "*Weltanschauung*" merupakan hal yang fundamental, dasar dari filsafat, kontemplasi pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, serta hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi" (Pusdatin, 2021). Oleh karena itu, Pancasila merupakan sebuah alat untuk mempersatukan bangsa, "yang Saya yakin seyakin - yakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu" (Latif, 2012).

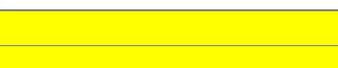
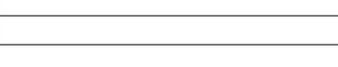
Ditegaskan pula dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019 tentang pentingnya pendidikan kebhinnekaan melalui pendidikan kewarganegaraan di lembaga pendidikan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkukuh nilai-nilai toleransi, keterbukaan

dan penerimaan, mengembangkan apresiasi terhadap kebhinekaan sosial budaya, memperluas pengetahuan visi, hak-hak sipil, kewarganegaraan, sebagai tanggung jawab dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang baik, dimana NKRI meletakkan dasar yang sangat kokoh dan tonggak yang kuat bagi perkembangan kehidupan beragama Maahury dalam (Edy Sutrisno, 2019).

Pemimpin dalam seni kepemimpinannya dapat mempengaruhi, mengarahkan, menggerakkan suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan kepentingan bangsa dan negara dengan kewenangan untuk memutuskan, pengetahuan sesuai tuntutan organisasi, tindakan cerdas yang bertanggung jawab, kemampuan melaksanakan tugas berdasar UUD NRI 1945 dan Pancasila (Ernawam, 2017). Jiwa kepemimpinan sangat penting dimiliki oleh manusia guna menunjang kelancaran suatu gerakan dalam organisasi, selaras dengan pengertian kepemimpinan pernyataan yang dikemukakan oleh (Dewi & Tandi, Rahman, n.d.) menunjukkan ketika di lingkungan kerja, istilah peran digunakan, khususnya manajer dan bergantung pada siapa yang didelegasikan atau diberikan posisi juga diharapkan untuk menjalankan peran mereka seperti yang diharapkan menduduki posisi tersebut. Itulah mengapa ada yang disebut ekspektasi peran perlu dalam wujud fungsi komunikasinya. Peran dari pemimpin dalam komunikasi sosialnya menjadi penting dalam keberhasilan proses penyampaian pesan.

Wujud dari fungsi komunikasi sosial pemimpin yang terjadi disini dapat dipetakan pada table 1, di bawah ini:

**Table 1** Wujud Fungsi Komunikasi Pemimpin

NO	Wujud Fungsi Komunikasi Pemimpin	Keterangan Fungsi Komunikasi
1	Bantuan Pemerintah melalui PKH (BLT)	  
2	Pembangunan Papua yang didukung oleh pemerintah	  
3	Pemilihan kepala kampung di Skouw	  
4	Perayaan hari kemerdekaan Indonesia	   
5	Interaksi hubungan masyarakat Papua dengan masyarakat Papua Nugini	  

6	Sistem relasi kenegaraan dengan Papua Nugini	
---	--	--

Sumber : olahan peneliti



Dapat dilihat pada tabel 1 Pemetaan dari data wawancara, peran fungsi komunikasi dalam penyampaian pesan terhadap khalayak, yakni masyarakat kampung Skouw yang memiliki fungsi komunikasi sangat baik. Baik secara sosial, ekspresif, ritual maupun instrumental terimplementasikan dalam beberapa rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dijalani oleh masyarakat kampung Skouw. Dalam pelaksanaan sebuah program yang dijalankan dari pemerintahan dibutuhkannya komunikasi dan jalur koordinasi yang jelas, sehingga kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Ode et al., 2023). Aktivitas komunikasi yang dimaksud yakni, berupa bantuan oleh pemerintah melalui PKH (BLT), pembangunan Papua yang didukung oleh pemerintah, pemilihan kepala kampung, perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia, interaksi hubungan antar masyarakat serta hubungan atau relasi secara kenegaraan antara masyarakat Indonesia di Papua dengan Papua Nugini.

Masyarakat Kampung Skouw menerima bantuan dari pemerintah melalui program bantuan seperti pemberian sembako lewat PKH (Program Keluarga Harapan) maupun bantuan yang diterima secara langsung lewat BLT (Bantuan Langsung Tunai). Program bantuan tersebut merupakan implementasi dari fungsi komunikasi secara ekspresif, dimana timbulnya perhatian, peduli serta simpati yang dimiliki oleh pemimpin daerah kepada masyarakat Kampung Skouw. Terdapat pula fungsi komunikasi secara sosial, yakni pemimpin daerah yang mengetahui kondisi dari kehidupan (khususnya ekonomi) masyarakat Kampung Skouw, yang kemudian melaksanakan program bantuan dengan harapan ingin memberi kelangsungan hidup yang lebih sejahtera yang kemudian dapat membuahkan hasil yang baik serta meminimalisir tekanan & ketegangan akibat dari masyarakat yang hidup di daerah perbatasan.

Tidak hanya memberi bantuan melalui program PKH ataupun BLT, pemimpin tersebut juga turut memperhatikan kondisi wilayah dari Kampung Skouw. Para pemimpin berupaya untuk melaksanakan program pembangunan di wilayah Kampung Skouw sehingga dapat mempermudah kan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas untuk keberlangsungan hidup. Upayanya dengan melakukan pembangunan yang selaras dengan program bantuan kepada masyarakat Kampung Skouw, selaras dengan implementasi fungsi komunikasi-nya, yakni secara ekspresif serta sosial. Perhatian dan kepeduliannya dalam membangun komunikasi yang baik dilakukan oleh pemimpin tersebut dengan bertindak bijaksana saat melakukan komunikasi kepada jajarannya dan masyarakat setempat untuk pembangunan kampung Skouw.

Fungsi komunikasi secara sosial juga terimplementasikan pada pemilihan kepala kampung di Skouw. Pemilihan kepala kampung atau desa dilakukan dengan tujuan pembangunan konsep diri ataupun aktualisasi diri, baik bagi pemimpin atau kepala kampung beserta jajarannya dan masyarakat setempat dari kampung Skouw. Apabila memiliki kepala kampung atau desa yang bersifat positif dengan bijak, berwibawa serta mampu bergotong-royong dan mengayomi, maka dapat memberikan kesejahteraan, kerukunan serta terhindarnya dari tekanan hingga ketegangan bagi masyarakat kampung atau desanya. Sementara itu, fungsi komunikasi secara sosial yang terjadi

dalam proses pemilihannya, dilakukan secara massal atau bersama-sama. Masyarakat di kampung Skouw turut mendukung pemilihan calon pemimpin yang dilakukan secara demokrasi karena masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban dalam terhadap suatu keputusan.

Fungsi komunikasi sosial tercermin dalam interaksi masyarakat desa Skouw yang merasakan dampak positif dari kinerja pemimpin melalui program bantuan berupa PKH & BLT oleh pemerintah. Komunikasi yang dilakukan dengan terlebih dahulu memahami kondisi masyarakat dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan, dimana pemerintah menunjukkan perhatian, kepedulian dan simpati terhadap desa Skouw. Fungsi komunikasi ekspresif terlihat dari kesadaran dan jiwa nasionalisme masyarakat Desa Skouw yang ikut merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat mengungkapkan rasa cinta, bangga dan semangat patriotismenya melalui upacara kegiatan dan pengibaran bendera Merah Putih.

Fungsi komunikasi ritual sebenarnya juga berperan disini. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan seremonial seperti perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang menggambarkan konsistensi dan kesatuan dalam menjalankan praktik-praktik secara simbolis yang memperkuat ikatan sosial dan identitas budaya. Sedangkan pada fungsi komunikasi instrumental dapat dilihat dari hubungan dan interaksi antara masyarakat kampung Skouw dengan masyarakat dari negara tetangga yaitu Papua Nugini. Hal ini berdampak pada aspek ekonomi, hubungan sosial, dan aktivitas sehari-hari yang bersifat lintas batas sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks yang berbeda yaitu pada saat perayaan hari nasional, pemimpin atau kepala Kampung Skouw turut memperingati serta merayakannya, salah satunya peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Teladan yang dilakukan seorang pemimpin mengkomunikasikan bahwa upacara dan pengibaran bendera merah putih, bentuk komunikasi yang efektif dalam bentuk fungsi komunikasi ritual. Sehingga masyarakat bersama-sama memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berpartisipasi dalam kegiatan upacara, menunjukkan konsistensi diri terhadap suatu ritual yang dijalankan serta bersifat simbolik sebagai wujud nasionalismenya. Fungsi komunikasi ritual terkait dengan sebuah proses yang dilakukan secara masal atau bersama-sama guna menyatakan kata-kata serta perilaku yang bersifat simbolik. Secara teori hal tersebut dilakukan oleh seseorang guna menyatakan kekonsistennan dirinya terhadap ritual yang dijalankannya. Fungsi komunikasi ini erat kaitannya dengan sebuah tradisi keluarga, suku, bangsa, negara, ideologi dan agama. Fungsi komunikasi ritual ini lebih menekankan pada kegiatan komunikasi yang bersifat kolektif atau kelompok untuk tujuan menginformasikan kearifan lokal dan budaya setempat. Komunikasi ini perlu juga dimiliki oleh seorang pemimpin dalam proses kepemimpinannya. Apalagi jika mampu berempati dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda dari kearifan lokal daerahnya. Kekayaan budaya yang dipahami sebagai wujud keBhinnekaannya yang dipraktikkan dalam memahami dan berkomunikasi dengan Masyarakat yang beragam.

Namun demikian, berbeda halnya dengan tujuan fungsi komunikasi ekspresif untuk mempengaruhi orang lain, dapat dijadikan sebagai media penyampaian perasaan atau emosi. Pengungkapan perasaan atau emosi dapat dikomunikasikan secara verbal atau nonverbal. Namun menurut (Ubaidillah, 2016) perasaan atau emosi lebih dominan dikomunikasikan secara nonverbal, seperti pengungkapan perasaan sayang, peduli, simpati, sedih, takut, prihatin, marah dan benci. Fungsi ini kurang relevan jika

diterapkan oleh pemimpin. Seorang pemimpin tidak perlu terlalu ekspresif dalam mempengaruhi masyarakatnya. Ketenangan dan keteduhan dalam ber ekspresi menunjukkan kewibawaan seorang pemimpin dalam menghadapi ekspresi dinamika masyarakat yang beraneka ragam dalam mengekspresikan nasionalismenya.

Nasionalisme hasil dari konsep bangsa yang mengacu pada perasaan cinta, kebanggaan, rasa persatuan di antara warga bangsa, serta semangat untuk bersama-sama mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat semangat untuk saling membela bila terjadi ancaman dari pihak manapun dan semangat untuk saling berkorban guna memelihara kebersamaan, keutuhan dan eksistensi bangsa dan negaranya. Konsep kebangsaan dan konsep negara kesatuan bagi bangsa Indonesia dicetuskan oleh para pemuda Ketika mereka menyatukan tekadnya dalam sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yaitu "Satu nusa, keluarga satu bangsa, satu Bahasa: Indonesia". Saat itu, para pemuda berikrar untuk mendirikan negara (nusa) Bernama Indonesia. Dengan Nilai kesatuan wilayah, Persatuan Bangsa, Kemandirian Bangsa.

Selain konsensus NKRI, terdapat konsensus *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Muhammad Yamin mengatakan bahwa *Bhinneka Tunggal Ika* dijadikan semboyan bagi NKRI. Jiwa dan Semangat Bangsa untuk kembangkan antara lain Kebudayaan, Adat Istiadat, Tradisi, Agama, Bahasa, Tata Kehidupan (sesuai lingkungan Masyarakat). Mengacu bahasa Sanskrit, hampir sama dengan semboyan "ePluribus Umum", semboyan Bangsa Amerika Serikat yang maknanya "*diversity in unity*", perbedaan dalam kesatuan (Pimpinan MPR RI, 2014).

Sarana untuk memberikan keleluasaan (kebebasan) bagi semua warga bangsa untuk mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, tradisi, agama, bahasa dan tata kehidupan sesuai dengan lingkungan masyarakatnya demi memperkuat persatuan bangsa dan hubungan antar warga yang harmonis. Tidak boleh saling mendiskreditkan, mengganggu, dan merendahkan warga atau kelompok lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rosmawati Maahury, 2022) menemukan bahwa pentingnya pendidikan kebhinekaan ditegaskan dengan gejala kaburnya makna kebhinekaan dalam masyarakat. Diskriminasi berdasarkan SARA, yang menimbulkan konflik sosial berdasarkan perbedaan individu atau kelompok, dan egoisme berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok merupakan jamur yang mulai tumbuh dan harus segera dimusnahkan dari negeri tercinta Indonesia. Kebhinnekaan dan pengenalan akan Nusantara ini menjadi penting terus ditumbuhkan dalam setiap moment serta pentingnya nilai-nilai Pancasila didoktrinkan menjadi sebuah gaya hidup masyarakat.

Secara sosial peringatan hari kemerdekaan dengan menggunakan pakaian adat Nusantara yang berbeda-beda, dengan belajar menyesuaikan diri dengan cara ekspresi kedaerahan yang diwakilinya dalam busana yang digunakan. Etika busana, komunikasi dan pergaulan turut mengonstruksi konsep diri dalam aspek konsep adat, budaya serta sikap nasionalisme yang tinggi oleh seluruh masyarakat Kampung Skow dan seluruh jajaran pemimpinnya. Sedangkan pada bentuk ekspresif, dapat dilihat dari adanya kegiatan pawai, panggung hiburan kebangsaan dengan menyanyikan lagu-lagu, lomba-lomba kemerdekaan, dan kearifan lokal setempat menunjukkan rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat kampung Skouw. Wujud lain semangat cinta tanah air serta simpati dan empati dalam hal peringatan perjuangan para pahlawan dalam membela tanah air dan memperoleh kemerdekaan seluruh lapisan masyarakat terus digaungkan

dan diperingati sebagai peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Indonesia sebagai wujud ekspresi dan nasionalisme.

Masyarakat kampung Skouw juga menjalin interaksi atau aktivitas sosial serta relasi dengan negara tetangga di perbatasan yaitu Papua Nugini. Terjalannya relasi atau interaksi dengan negara tetangga tersebut turut menjadi contoh dari implementasi fungsi-fungsi komunikasi. Secara ekspresif, masyarakat kampung Skouw dengan masyarakat negara Papua Nugini, sama-sama memiliki rasa saling menghargai hingga tolong menolong. Hubungan saling menghargai satu sama lain terjalin dengan baik sehingga menimbulkan rasa peduli, tolong menolong, dan adanya rasa sayang. Hal ini terbukti dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa masyarakat dari kampung Skouw memiliki hubungan maupun keluarga dari negara Papua Nugini dan begitu juga sebaliknya. Serta melakukan ritual aktivitas sosial budaya yang saling melengkapi satu sama lain sebagai contoh ritual sosial budaya perarakan penerimaan keluarga mempelai dari negara yang berbeda dan adat yang berbeda namun satu sama lain saling menerima, ditandai dengan perarakan sebagai simbolik menerima perbedaan yang terjadi tetapi menyatu satu kesatuan keluarga. Sedangkan dari bentuk sosial, adanya interaksi yang dapat mendorong pemenuhan kebutuhan mereka (khususnya masyarakat kampung Skouw) untuk kelangsungan hidup, yaitu dengan transaksi jual beli kebutuhan pokok manusia berupa transaksi jual beli barang dan jasa baik secara ekonomi hingga kebutuhan mendasar berupa sandang, pangan, dan papan (belanja pakaian, makanan, dan kebutuhan perlengkapan rumah).

Selain dari fungsi komunikasi yang berbentuk secara ekspresif, sosial, dan ritual, terdapat pula fungsi komunikasi instrumental yang diimplementasikan oleh masyarakat kampung Skouw. Fungsi komunikasi instrumental ini dapat dilihat dari adanya relasi yang terjalin antara masyarakat kampung Skouw dengan masyarakat dari negara Papua Nugini. Relasi tersebut berupa hubungan kenegaraan yang terjalin antara Indonesia dengan Papua Nugini secara sistem pemerintahan berjalan dengan baik, harmonis, dan saling menguntungkan. Akulturasi budaya terjalin dengan baik sebagai upaya untuk mendorong perubahan sikap hingga keyakinan ataupun menggerakkan suatu tindakan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya setempat. Masyarakat kampung Skouw dapat memberdayakan masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan cara memberikan kesempatan untuk dapat berkiprah di bidang ekonomi dengan tidak merugikan satu sama lain seperti menunjang aktivitas atau kehidupan yang dapat berdampak pada perekonomian mereka. Seperti berjualan ke negara tetangga, menambah relasi hingga hubungan baik sehingga terjadi pernikahan lintas negara serta kepemilikan anggota keluarga antar masyarakat yang berbeda negara beserta budaya tetapi tetap harmonis dan bersatu. Dari temuan yang berupa wujud komunikasi, temuan lain penelitian ini berkaitan dengan dampak komunikasi sosialnya. Sehingga dampak tersebut dapat dilihat pada ulasan analisis dan diskusi berikut terkait dengan dampak komunikasi seorang pemimpin.

#### **Dampak Komunikasi Sosial Seorang Pemimpin di Daerah Perbatasan.**

Harapan peran pemimpin dalam posisinya dapat dipisahkan dari harapan pelanggan dan harapan penerima manfaat dari pekerjaan/tugas tersebut. Sehingga untuk mencapai hasil dari kepemimpinan yang baik bagi suatu organisasi atau suatu wilayah harus diadakannya pemilihan seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu untuk menjalankan tugas suatu organisasi agar mencapai tujuan yang

diharapkan. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irawati, 2020 dalam Karunia D, Ibnu H, 2022); Djaharuddin, 2021 dalam Disatra et al., 2022) mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja yang dilakukan dan menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Seorang pemimpin yang memiliki kepedulian, rasa empati tinggi, kompetensi dalam bidangnya dan dapat memberikan motivasi kepada masyarakatnya juga menjadi faktor penting untuk menjadikan seorang pemimpin yang baik (Ariani, Komunikasi, & Indonesi, 2023). Pemimpin yang baik harus mampu menuangkan ideologinya dalam sebuah tulisan maupun lisan, komunikasi tertulis seperti kemampuan membuat siaran pers untuk media dan publik, sedangkan komunikasi lisan adalah kemampuan berbicara depan umum (Jumaidin, Oleo, Kendari, & Artikel, 2022).

Pemimpin merupakan subjek (orang) yang menjalankan kepemimpinan tersebut. Sehingga proses komunikasi sosial seorang pemimpin sangat diperlukan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Minimnya akses informasi yang masuk ke daerah perbatasan, dari Ibu Kota maupun Pusat Kota pemerintahan daerah setempat dapat membuat warga perbatasan lebih banyak menerima akses dan informasi dari negara lain atau negara tetangga juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, fungsi komunikasi pemimpin untuk masyarakat perbatasan menjadi penting diteliti lebih lanjut, beserta dampak yang ditimbulkan. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin dalam teoritical konseptualnya terdapat dalam fungsi komunikasi yang terdiri dari empat fungsi salah satunya fungsi komunikasi sosial pemimpin. Dari temuan di atas maka dapat dilihat dampaknya sebagai berikut:

**Tabel 2** Dampak Positif dan Negatif

No.	Dampak Positif komunikasi yang baik	Dampak Negatif komunikasi yang buruk
1.	Masyarakat memiliki jiwa toleransi yang tinggi.	Tidak meratanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang dapat menimbulkan konflik.
2.	Masyarakat mengalami peningkatan kualitas hidup.	Rentan terjadinya terpaan budaya asing karena kurangnya sosialisasi hal - hal positif mengenai nilai - nilai kebangsaan yang dapat menimbulkan keresahan penduduk.
3.	Nasionalisme yang tinggi dimiliki olehsebagian besar masyarakat sekitar.	Masuknya narkoba dan pergaulan bebas jika kurang sosialisasi kewaspadaan Nasional terhadap ancaman bahaya narkoba yang menyebabkan pertikaian antar warga.
4.	Solidaritas antar warga meningkat.	Menipisnya semangat juang, kurang ulet dan tangguh saat menghadapi dinamika sosial ekonomi karena ketahanan nasional yang lemah.

5.	Saling tolong menolong (senasib sepenanggungan) terdiantara pemimpin dan masyarakatnya.	Kurangnya sarana dan prasarana yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan berdampak pada peningkatan kualitas perekonomian.
----	---	--

Sumber: olahan peneliti

Dari **tabel 1.2** di atas menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin di daerah perbatasan dari hasil wawancara dan olahan data menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang berdampak positif dan negative. Artinya bahwa, tidak semua maksud baik yang ingin dikomunikasikan oleh pemimpin disikapi atau direspon positif, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena telah terjadi perpecahan yang terjadi di wilayah kampung perbatasan tersebut. Kampung Skouw Yambe sendiri berdiri sejak tahun 1988, merupakan pecahan dari kampung Induk yang terpecah menjadi tiga kampung, yakni Sae, Mabo dan Yambe. Dalam wawancara yang dilakukan dengan tiga informan, yakni: *Pertama*, tokoh Masyarakat Kepala Kampung Skouw Yambe (MM); *Kedua*, tokoh Pemuda yang bernama (AM); *Ketiga*, tokoh Perempuan yang bernama (AF). Sebagai informan yang diwawancarai, mereka menjelaskan tentang kondisi Indonesia dimana Indonesia sebagai sebuah negara yang dicintai, Indonesia yang dibayangkan adalah bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda, dan berada di perbatasan dengan negara lain.

Sebagai negara yang pernah terjajah, namun tetap dibanggakan sebagai Negara tempat dibesarkannya dan sebagai tanah leluhurnya dimana orangtuanya berjuang sampai akhir hayatnya. Keluarga besar mereka, tetap merindukan jika suatu kelak nanti beliau meninggal akan tetap dikuburkan di tanah air Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga perwakilan tokoh di atas mencintai tanah airnya. Banyak hal lagi yang menunjukkan kecintaannya terhadap tanah leluhurnya walaupun negara tetangga menjanjikan peningkatan ekonomi, sosial, dan hal-hal lainnya yang menggiurkan, mereka tetap tidak merubah kewarganegaraannya (MM. Wawancara/ 20 Des 2022). Masyarakat tetap melakukan kegiatan dan berinduk ditanah Indonesia serta tetap menjadi warganegara Indonesia.

Walaupun kampung induk terpecah menjadi tiga, masyarakat sekitar tetap mengakui bahwa mereka adalah warga negara Indonesia, karena memang bahasa dan pelajaran yang ada menggunakan Bahasa Indonesia. Selain dari hal bahasa, masyarakat Skouw Yambe juga mengakui kedaulatan pemerintahan Indonesia, adapun pemerintahan di zaman kepemimpinan Joko Widodo dirasa lebih memperhatikan daerah-daerah perbatasan seperti dari bantuan-bantuan pangan dan dana. Kampung Skouw Yambe, tidak ikut campur dalam gerakan separatis yang ada, masyarakat dinilai netral karena dianggap tidak memiliki intensi untuk memisahkan daerahnya dari NKRI. Pembangunan di Skouw Yambe sudah mengalami perbaikan, mulai dari jalan raya sampai ke rumah dan bangunan. Yang mana perjalanan ke Papua New Guinea lebih mudah karena akses infrastruktur yang memadai (MM. Wawancara/ 20 Des 2022). Artinya keterlibatan komunikasi sosial pemimpin telah berjalan dengan baik dengan wujud dan bukti-bukti kinerjanya di atas yang juga masih dapat dirasakan masyarakat.

Makna kebangsaan yang dijelaskan dalam fundamental konsensus dasar negara, sudah direalisasikan di Skouw Yambe. Diluar dari perbedaan ras, tidak ada perbedaan masyarakat Papua dan daerah lainnya selama masih dinaungan negara Indonesia. Tokoh Masyarakat yang diwawancarai ini dipilih sebagai kepala kampung Skouw

Yambe sejak 2019, mengatakan bahwa hampir tidak ada kendala yang signifikan dalam perjalanan sebagai kepala kampung, hanya perihal minor seperti perihal teknis dan lapangan yang sering terjadi di kampung Skouw Yambe (MM. Wawancara/ 20 Des 2022). Artinya demokrasi dan komunikasi antar pemimpin dapat berjalan dengan baik dan dapat teratasi dengan baik hal-hal teknis yang menjadi kendala.

Adapun dengan kajian yang ada di masyarakat perbatasan dan implementasi nilai-nilai kebangsaan, ditemukan bahwa banyak suku pendatang seperti dari daerah Jawa, Madura, Makasar, Manado, Sulawesi, atau Buton, tidak ada konflik dan perbedaan, persatuan tetap terjaga sebagaimana yang di amanatkan dalam fundamental konsensus dasar dalam bernegara. Perjalanan *stakeholder* pun berjalan lancar seperti pendataan kartu keluarga, AKTA, dan KTP, karena dari dinas terkait turun langsung untuk sosialisasi langsung ke kampung-kampung (Prasetya, 2023). Artinya, peran *stakeholder* dalam hal ini komunikasi pemimpin yang berpartisipasi membangun Papua sangat diperlukan. Ini menegaskan pentingnya keterlibatan *stakeholder* dalam mencegah degradasi nilai yang ditimbulkan dari kondisi dinamis bangsa perlu mendapat perhatian dalam mengelola daerah perbatasan khususnya keuletan dan ketangguhan seluruh *stakeholder* yang terlibat (Yuniar R., & Setra 2020).

Kemudian pada wawancara yang dilakukan kepada tokoh Pemuda dimana dalam rangka menjalankan konsensus dasar negara, ia mengatakan bahwa pemerintah sendiri sudah menjalankan program bantuan seperti BLT yang langsung turun ke masyarakat, adapun yang berbentuk sembako lewat PKH yang berupa telur, beras, ayam dan lainnya, yang mana tokoh Pemuda ini merasakan sangat terbantunya masyarakat sekitar dengan adanya bantuan dari pemerintah. Adapun nilai-nilai keadilan dalam Pancasila diterapkan dengan baik, seperti pembagian BLT yang melalui pendataan, sehingga masyarakat yang sudah mendapatkan BLT dari pusat, tidak akan mendapatkan BLT dari kampung dan di fokuskan kepada yang belum mendapatkan (AM.Wawancara/ 21 Des 2022). Adapun interaksi dengan negara perbatasan yaitu Papua New Guinea lebih banyak dilakukan di perbatasan demarkasi saja, untuk kunjungan ke perbatasan, jika masyarakat sekitar berkunjung ke Papua New Guinea, mereka menggunakan bahasa mereka, maupun sebaliknya saat masyarakat Papua New Guinea berkunjung ke Papua, mereka menggunakan bahasa sekitar ataupun bahasa Indonesia, tak jarang mereka menggunakan bahasa isyarat saja. (AM&AF. Wawancara/ 21 Des 2022; MM. Wawancara/ 20 Des 2023).

Interaksi seperti pembelian bahan tertentu ataupun bisnis lainnya, biasanya mereka bertukar pesan menggunakan handphone lalu bertemu di perbatasan. Mereka biasa menggunakan paspor ataupun *red card* untuk melintasi perbatasan, pihak imigrasi akan mencatat masyarakat dan menanyakan berapa lama dan perihal apa mereka melintasi perbatasan. Dimana untuk bisnis ataupun pertukaran mata uang, kedua mata uang yaitu Rupiah (Indonesia), dan Kina (Papua New Guinea) sama-sama berlaku dan sah dalam pertukaran. Melihat dari progresi pembangunan, sekitar 50-60% progresif pembangunan sudah direalisasikan. Infrastruktur kampung Skouw Yambe, rumah dan bangunan serta infrastruktur tambahan lainnya sangat membantu masyarakat sekitar (MM. Wawancara/ 20 Des 2022 & AF. Wawancara/ 21 Des 2022).

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan tokoh Perempuan. Pemerintah sudah melakukan upaya yang signifikan dalam pembangunan Papua, permasalahan utama adalah bagaimana hierarkis yang ada dirasa tidak melakukan tugasnya dengan baik. Pemerintah pusat harus ikut andil dan melakukan survey dalam hierarkis di Papua,

khususnya di Skouw Yambe. Dimana pemerintah pusat harusnya ikut turun tangan dalam pendistribusian yang ada di Papua, karena sering dirasa bahwa dari pemerintahan pusat sudah menurunkan bantuan, tetapi bantuan tersebut berkurang ataupun hilang sebelum sampai di masyarakat. Pemerintahan melalui PU menjalankan perbaikan jalan tanpa mengikuti sertakan pemerintahan kampung, karena rawan untuk adanya praktik penyelewengan dana. (AF, Wawancara/ 21 Des 2022).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsensus dasar dalam bernegara dalam praktiknya sudah direalisasikan, walaupun secara teknis masih banyak permasalahan yang harus dibenahi. Artinya proses komunikasi yaitu penyampaian pesan baik yang bersifat informatif maupun edukatif perlu dilakukan dan diekspose oleh media. Sebagai contoh keterwakilan dari testimoni tokoh tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja dan komunikasi pemimpin telah dilakukan sehingga perlu dilanjutkan serta lebih dioptimalkan untuk mendapatkan hasil lebih maksimal.

Kesimpulan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Juditha, 2016) dengan strategi komunikasi menggunakan radio sebagai media penyebaran informasi didapatkan hasil dalam menjalankan strategi pemrogramannya, RRI Jayapura berupaya menciptakan program siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan dan membangun kebiasaan mendengarkan (*habit formation*) untuk mendengarkan program-program yang berbau nasionalisme pada waktu-waktu tertentu. RRI juga terus menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat, sehingga memaksimalkan jumlah pendengar (*managing audience*) tidaklah sulit. Ketersediaan bahan dan sumber daya lainnya (*conservation of program resources*) juga merupakan aspek yang dipertimbangkan keduanya. Termasuk mengemas acara yang menarik dan mempertimbangkan minat (*breadth of appeal*) pendengar. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Syuhudi, 2019) dengan hasil berdasarkan pengetahuan generasi muda Jayapura tentang konsensus negara (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Keberagaman) dapat dikatakan baik. Hampir semua orang di generasi muda mengetahui persetujuan negara. Didapati bahwa generasi muda Jayapura bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Namun, mereka berharap pemerintah lebih serius untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat agar tidak menimbulkan perbedaan ekonomi dengan orang non-Papua. Selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa strategi fungsi komunikasi sosial sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan empat konsensus dasar di Indonesia.

Dengan meningkatnya fungsi komunikasi pemimpin di daerah perbatasan, nilai-nilai fundamental kebangsaan pada masyarakat di daerah dapat meningkat seiring dengan pembangunannya, sebagai upaya peningkatan keamanan perbatasan untuk mewujudkan NKRI. Dimana keamanan perbatasan berbanding lurus dengan ketahanan nasional sebagai sebuah upaya *national power development* yang sesuai dengan empat konsensus dasar bangsa yang telah di jabarkan. Adapun kondisi-kondisi dinamis bangsa haruslah mengatasi aspek-aspek seperti ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan- gangguan laten, maupun internal dan eksternal, yang mana ketahanan nasional dijadikan sebagai sebuah dasar dalam bernegara. Fungsi tersebut merupakan sebuah pedoman dalam pembangunan negara secara berkesinambungan melalui metode-metode yang bersifat komprehensif berdasarkan kekayaan negara seperti bonus demografi dan geografi, sumber daya alam dan manusia, ideologi negara, ekonomi-politik, sosial budaya serta pertahanan keamanan nasional.

Nasionalisme masyarakat Skow Mabo dipresentasikan dalam reaksi mayoritas masyarakat di sepanjang perbatasan Indonesia-PNG, mereka mengaku bangga sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya apabila dilihat dari NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi tinjauan historis nasionalisme, kecintaan pada bangsa dan tanah air merupakan produk dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual pada suatu tahapan sejarah. Nasionalisme sendiri disini diartikan suatu kondisi pikiran, perasaan atau keyakinan sekelompok manusia pada suatu wilayah geografis tertentu. Dimana yang berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki kebudayaan yang mencerminkan aspirasi bangsanya, terlekat pada adat dan tradisi bersama, memuja pahlawan mereka sendiri dan mempunyai toleransi terhadap keberagaman dalam suku, ras, agama dan adat Markus dalam (Syuhudi, 2020). Salah satu wujud nasionalismenya dengan berbagai cara, antara lain dengan mengibarkan bendera merah putih di kebunnya setiap menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus, menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan menghafal lagu Garuda Pancasila. Mereka hafal lagu-lagu itu di sekolah dan masih mengingatnya sampai sekarang. Mereka pun melanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada 17 Agustus dalam upacara yang diselenggarakan Kantor Camat Muara Tami. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa adanya sisi nasionalisme Masyarakat Jayapura untuk NKRI.

Asumsi atau *stereotype* yang terbentuk di daerah perbatasan tentang hal-hal negatif seperti seks bebas, narkoba, dan budaya-budaya yang tidak mencirikan budaya ketimuran, bukan suatu budaya yang sudah ada dan diwariskan di Indonesia. Jayapura sendiri sering dianggap sebagai area marginal karena jauh dari pusat pemerintahan sehingga kerap luput dari jangkauan pemerintah. Karena hal ini telah di patahkan dengan kondisi dinamis suatu negara yang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat, hal-hal negatif di atas tidak mempengaruhi masyarakat setempat apabila mendapat dukungan penuh oleh seluruh *stakeholder*. (Yuniar R., & Setra 2020). Sehingga Jayapura telah menjadi kekuatan bangsa yang eksistensinya dan budayanya tetap terpelihara sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang mengakar pada seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembangunan infrastruktur dan loyalitas dalam mengelola serta menata sistem yang ada, menjadikan perbatasan daerah prioritas yang layak terus dikelola dengan baik dengan cara yang tepat dan bijaksana. Fokus prioritas pembangunan negara yang juga memperhatikan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan NKRI yang harmonis, adil, dan sejahtera sebagai perwujudan implementasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Kesimpulan

Wujud fungsi komunikasi pemimpin yang efektif untuk membangun daerah perbatasan adalah fungsi komunikasi sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Dalam meningkatkan pembangunan nilai-nilai kebangsaan di daerah perbatasan harus dikomunikasikan dengan masif dan kuat dengan cara mengimplementasikan 4 (empat) fungsi komunikasi di atas. Di daerah perbatasan yang paling terbukti efektif fungsi komunikasi sosial pemimpin kepada masyarakatnya. Fungsi komunikasi ekspresif tercermin dalam simpati dan perhatian pemerintah terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan fungsi komunikasi sosial tercermin dalam interaksi antar warga, pemilihan kepala desa yang demokratis, dan peringatan hari kemerdekaan yang menciptakan rasa nasionalisme dan identitas bersama. Fungsi komunikasi ritual tampak dalam keikutsertaan masyarakat dalam upacara, menunjukkan konsistensi dan simbolisme

budaya. Fungsi komunikasi instrumental tercermin dalam hubungan dengan negara tetangga Papua Nugini yang mendorong kerja sama ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat Desa Skouw memanfaatkan berbagai bentuk fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi berperan penting dalam membentuk dan membangun hubungan sosial, mempertahankan identitas budaya dan nasionalisme masyarakat desa Skouw. Selain itu, juga dapat membantu dalam mencapai kelangsungan hidup yang lebih baik melalui hubungan dengan pemerintah dan dari negara tetangga, negara Papua Nugini.

Upaya pemerintah mengkonstruksi nilai kebangsaan berdasarkan empat konsensus dasar dalam bernegara tepat sasaran dan harus terus dioptimalkan dan terus dikembangkan. Nilai-nilai kebangsaan yang melekat di masyarakat Papua khususnya di kampung Skouw Yambe terlihat pada upaya orang tua menanamkan nilai-nilai luhur bangsa berdasarkan etika dan kearifan lokal yang berlaku. Secara turun temurun dari orang tua ke anak mengajarkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air adalah variabel mayor lainnya yang berperan penting dalam penanaman nilai-nilai tersebut dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sebenarnya, nilai-nilai kebangsaan tertancap kuat di masyarakat Papua, walaupun ada beberapa kelompok tertentu yang ingin merusaknya, dengan intervensi dan provokasi untuk memisahkan diri dari Indonesia dan memprovokasi untuk melawan pemerintahan namun, hal tersebut tidak berhasil. Tidak menutup mata faktanya secara general hal tersebut menjadi hal minor yang dapat mengganggu kestabilan, namun perlu diwaspadai dan tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Dengan keterlibatan seluruh *stakeholder* (Pentahelix) Komunitas, Pemerintah, Dunia bisnis, Akademisi, Media, yang pemimpinnya menjalankan fungsi komunikasi dengan konstruksi nilai kebangsaan sebagai fondasinya dan sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dapat mewujudkan rakyat sejahtera, adil, dan Makmur.

Semakin besarnya rasa cinta tanah air berbanding lurus dengan bagaimana sikap pemerintah dalam memperhatikan masyarakat perbatasan dengan cara komunikasi yang intensif. Hal tersebut dibuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan, persebaran pembangunan infrastruktur yang begitu masif dan cepat sangat bermanfaat bagi masyarakat. Membuktikan bahwa masyarakat merasa semakin diperhatikan kebutuhan, dan infrastrukturnya secara penuh oleh pemerintah. Sebagai contoh telah berhasilnya kinerja perbaikan jalan, BLT, sembako, pembangunan rumah dan pelatihan ketrampilan UMKM, penguatan nilai-nilai kebangsaan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi wujud hasil fungsi komunikasi sosial yang efektif antara pemimpin dan rakyatnya. Walaupun praktiknya masih terdapat beberapa kesenjangan sosial, ekonomi, bahkan sampai kondisi patologis lainnya akibat kurangnya kontrol. Hal tersebut terus di kikis dan mengalami perbaikan secara terus-menerus dan perlu menjadi perhatian serta komitmen bersama untuk memperbaikinya. Namun demikian, secara teknis harus terus dalam pengawasan khusus dan dilakukan secara masif dan berkesinambungan. Kondisi yang sedang terjadi saat ini sebagai dampak persoalan pemerataan, keamanan, dan ekonomi di tiap-tiap distrik tersebut, perlu komunikasi yang efektif dari pemimpin dan jajarannya serta kepada masyarakat. Idealnya bahwa pemimpin harus memiliki nasionalisme yang kuat dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta gaya komunikasi, cara berkomunikasi yang tepat menghadapi masyarakat. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya sehingga komunikasi (pesan) yang ingin disampaikan tidak terdistorsi. pada apa yang telah terjadi, tentunya menjadi tanggung jawab bersama dengan melakukan bagian masing-

masing dibidangnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi perwujudan NKRI dan kepentingan bangsa dan negara.

## Referensi

- Ariani, D., Komunikasi, M. I., & Indonesi, U. (2023). *Struktur Organisasi Pemerintah Dalam Perspektif*. 8(3), 386–397.
- CNN Indonesia/BMW. (2022, September). 4 Jenazah Korban Pembantaian OPM di Papua Dievakuasi. *Cnnindonesia.Com*, p. 1.
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). Retrieved from file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design\_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr
- Deddy, M. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (8th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dewi, L., & Tandi, Rahman, S. (n.d.). *Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Mewujudkan Governance Berbasis Teknologi (Kajian Birokrasi Politik Pada Kelurahan Bende )*.
- Disatra, K., Hajar, I., & Saleh, S. (2022). Pengaruh Manajemen Pengetahuan, Motivasi Kerja Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Personil Anggota Kepolisian Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Polda Sultra. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Organisasi (JUMBO)*, 6(2), 512–525.
- Edy Sutrisno. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Ernawam, D. (2017). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 32(1), 1–54.
- Fatharossy, J. A. (2018). *Pengawasan Warga Negara Asing Di Perbatasan Indonesia (supervision of foreign citizens on the Indonesian border)*.
- Ilham, I., Muttaqin, Z., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104–109. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.722>
- Juditha, C. (2014). Tingkat Literasi Media Masyarakat di Wilayah perbatasan papua. *Journal Communication Spectrum*, 3(2), 107–120.
- Juditha, C. (2016). Strategi Programming Rri Jayapura & Merauke Dalam Penguatan Nkri Di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(1), 45–62.
- Jumaidin, L. O., Oleo, U. H., Kendari, K., & Artikel, I. (2022). *Pelatihan Public Speaking Dan Opini Publik Bagi Lurah / Sekretaris Lurah Dan Aparat Kecamatan Abeli*. 2(2), 192–201.
- Karunia D, Ibnu H, S. S. (2022). *Pengaruh Manajemen Pengetahuan, Motivasi Kerja Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Personil Anggota Kepolisian Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Polda Sultra*. 6(2), 512–525.
- Latif, Y. (2012). Kembali Ke Rumah Pancasila. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v1i1.442>
- Marsetio. (2009). “Pendayagunaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar guna mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.” *Seminar Pasis Dikreg XXXVI Sesko TNI*.
- Ode, W., Nurhaliza, S., Hidayanto, S., Tarifu, L., Bhayangkara, U., Raya, J., & Oleo, U. H. (2023). *masih dianut dan kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitasnya sebagai pelaut ( Obie , wilayah perairan Mandati membuat wilayah ini memiliki nilai lebih di mata masyarakat*. 8(3), 571–586.
- Pasha, S. M. (2018). *Analisis Isi Pemberitaan Kinerja Jokowi Tahun 2017-2018 Di Situs Citizen Journalism* *Pewarta-Indonesia.Com*. Retrieved from [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43786/1/SOFIE MEDINA PASHA-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43786/1/SOFIE%20MEDINA%20PASHA-FDK.pdf)

- Pimpinan MPR RI. (2014). *Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional* (M. Cahyono, Ed.). Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI.
- Prasetya, Y. (2023). *Bunga Rampai Implementasi Nilai - Nilai Kebangsaan Dalam NKRI* (B. Pramono, Ed.). CV. Aksara Global Akademia.
- Pusdatin. (2021). Ketum Muhammadiyah: Pancasila Sangat Moderat, Jangan Ditarik Ke Kanan atau Kiri.
- Rosmawati Maahury, Y. (2022). *Pluralisme Di Kabupaten Jayapura Sebagai Sketsa Pemikiran Membangun Bhineka Tunggal Ika Menuju Indonesia Damai*. 06(02). Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>
- Syarif, S. (2019). Analisis Teks Pidato Kenegaraan Presiden R.I Joko Widodo Tinjauan Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology*, 266(11), 122–130.
- Syuhudi, M. I. (2019). Potret Kebangsaan Generasi Muda di Kota Jayapura. *Mimikri*, 5(2), 124–140.
- Syuhudi, M. I. (2020). Dinamika Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Muara Tami Jayapura. *Al-Qalam*, 26(2), 281–294.
- Takari, D. M., Hum, M., & Ph, D. (2019). *Memahami ilmu komunikasi*.
- Tippe, S. (2013). Implementasi Kebijakan Bela Negara Di Perbatasan : Studi Kasus Di Provinsi Papua. *Jurnal Sosioteknologi*, 12(29), 416–440. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.6>
- Ubaidillah, A. (2016). Konsep dasar komunikasi untuk kehidupan. *Al-Ibtida'*, 4(2), 25.
- Usman, L. (2021). *Upaya Penguatan Nasionalisme Warga Perbatasan Papua Indonesia*. 18(November 2021), 61–76.
- Wahyono. (2009). *Indonesia Negara Maritim* (II). Jakarta: Teraju.
- Yuniar R.& Setra (2020). *Degradasi Pembangunan pada Daerah Perbatasn Jayapura dan Merauke (Perspektif Komunikasi Pembangunan dan Komunikasi Budaya)*. Jakarta.
- Yuniar, R., & Puspitasari, R. (2020). *Penerapan Pendidikan Cerdas Berkarakter Di Merauke (Perspektif Komunikasi)* (Vol. 5).